

RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMBERDAYAKAN PULAU PULAU TERLUAR DI INDONESIA PASCA
LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN**



Diajukan oleh :

Brigitta Anggraini Winda Sasmaya

NPM : 100510260

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN
RINGKASAN SKRIPSI / NASKAH PUBLIKASI**

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA PASCA
LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN**



Diajukan oleh :

Brigitta Anggraini Winda Sasmaya

NPM : 100510260
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional

Dosen Pembimbing 1

DR.G.Sri Nurhartanto.,SH.,L.LM

Dosen Pembimbing II

B. Bambang Riyanto.,SH.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

- I. Upaya Pemerintah Indonesia Mempertahankan dan Memberdayakan Pulau Pulau Terluar di Indonesia Pasca Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan
- II. Brigitta, Nur dan Bambang
- III. Ilmu Hukum / Fakultas Hukum / Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- IV. Abstract

the efforts of Indonesia Government to sustain and empower the outer island often the lost of sipadan and ligitan is the tittle of this thesis. it aim to uncover some of the background of the border conflict that took place between Indonesia and the neighboring countries as well as how to defend and empower the outer island and knowing the importance of the determination of the maritime borders of the republic of Indonesia through the maritime boundary should be clarified in addition it's also important to keep paying attention to the existence of these island is to be a decisive certainty of three types boundaries in the ocean that is the territorial limits, the limits of continental shelf and Exclusive Zone boundaries of Indonesia as well as increasing knowledge and awareness to support and even contributing to protecting the Island over an area that is at the outer Island point on the border with other countries. Legal efforts have been made by the Government of Indonesia in dealing with the outer island in Indonesia is since 2005 the island. It is the mandate of regulation No.112 of 2006 about standardization of national earth team. There are currently 13.466 island that has been done and is named (all island and then the rest of the outer island will be reported in the year 2017 . Twelve of the island include Nusa Kambangan island, the island of Miangas, Marore, Dubi. Construction of small outlying island is an attempt to support the acceleration of the development and the economic development of Indonesia, giving opportunities for tourism economy as well as helping the Government in safeguarding the sovereignty and defence of the country.

Keywords : the outer island, maintaning, sovereignty, empower

- V. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan. Contohnya adalah kasus mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dalam hal sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, hakim-hakim Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi yurisdiksi Malaysia.¹

Pertimbangan hakim-hakim Mahkamah Internasional dalam memenangkan Malaysia adalah didasarkan pada beberapa faktor yaitu : kehadiran terus menerus, pendudukan efektif, pengelolaan dan pelestarian alam. Hal tersebut ditegaskan dalam *Report of International Court of Justice* 1 Agustus- 31 Juli 2012, keputusan Mahkamah Internasional dilakukan melalui bargaining atau tawar-menawar yang dipimpin oleh hakim ketua Gilbert Guillaume dari Perancis yang menetapkan Malaysia mempunyai kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan demikian Malaysia berhak menarik

¹ Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta : CSIS hlm 80

garis pangkal sebagai batas wilayahnya sampai titik terluar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.²

Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara ditentukan.

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang beberapa diantaranya merupakan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga atau dapat disebut dengan pulau perbatasan atau pulau terluar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Di antara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius di antaranya: pulau Rondo, pulau Berhala, pulau Nipa, pulau Sekatung, pulau Marore, pulau Miangas, pulau Fani, pulau Fanildo, pulau Bras, pulau Batek, pulau Marampit dan pulau Dana karena posisi dan keberadaan pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah

² Kaligis O.C & Associates, 2003. *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta hlm 185

Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia.³

Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya:

1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.⁴

Pulau-pulau terluar memiliki arti strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional. Selain itu, memiliki kekayaan sumber

³ Hamzah, A. Laut, *Teritorial dan Perairan Indonesia 1984. Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya*, Akademika Pressindo, Jakarta hlm 20

⁴ <http://www.dephan.go.id/index.php> (6 agustus2013, 19.00WIB)

daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.

Wilayah perbatasan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar, masih dihadapkan pada permasalahan kejahatan perbatasan seputar pelanggaran batas wilayah, penyelundupan barang dan orang, infiltrasi terorisme, penangkapan ikan ilegal, *illegal logging*, dan kejahatan HAM. Berbagai bentuk pelanggaran ini kemudian memberikan dampak serius terhadap dimensi kedaulatan negara dan keamanan warga negara. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki wilayah laut yang ‘mengambang’ statusnya jika dilihat dari perspektif hak berdaulat (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen) sehingga seringkali memicu konflik.

Salah satu permasalahan di perbatasan yang paling fenomenal adalah sengketa pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia pada 17 Desember 2002, Bangsa Indonesia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Internasional mengenai hak kepemilikan yang sah atas Pulau Sipadan-Ligitan yang jatuh pada Malaysia. Berkaca pada peristiwa tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan utama di perbatasan Indonesia yang harus segera diatasi. *Pertama*, belum adanya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah laut. *Kedua*, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan pulau-pulau perbatasan atau terluar.

Hingga saat ini Indonesia belum menyelesaikan garis batas wilayahnya dengan 10 negara tetangga yaitu dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia di 37 segmen batas maritim dan 27 titik terluar tiga (*Tri Junctions Points*) serta belum memanfaatkan secara maksimal pulau-pulau terluar Indonesia.⁵

Batas maritim harus diperjelas, selain itu penting juga untuk tetap memperhatikan keberadaan pulau-pulau terluar yang terletak di perbatasan mengingat keberadaan pulau-pulau tersebut adalah menjadi penentu kepastian 3 jenis batas di laut yaitu batas teritorial, batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemerintah perlu menata aturan perundang-undangan mengenai keberadaan pulau-pulau tersebut mengingat posisinya yang bersinggungan dengan wilayah Internasional sehingga berpotensi di duduki negara-negara asing.

Rumusan Masalah

Upaya hukum apakah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pulau-pulau terluar di Indonesia?

⁵ Direktorat Kelembagaan Internasional 2005, ***Batas-Batas Maritim Indonesia dan Negara Tetangga, Departemen Kelautan dan Perikanan***, Jakarta hlm 31

VI. Isi Makalah

A. Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau

Sipadan dan Pulau Ligitan

1. Latar belakang kasus sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dinyatakan dalam keadaan status *status quo* akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami *status quo* sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. karena kita taat pada hukum internasional yang melarang mengunjungi daerah *status quo* atas kedua pulau tersebut. Sehubungan dengan masalah ini, kedua negara pada tanggal 22 September 1969 menyetujui *Memorandum Of Understanding (MOU)* yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan dalam *status quo* yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki, dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia

2. Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia melalui Mahkamah Internasional

Setelah mengalami perdebatan yang sengit, akhirnya kedua Negara tersebut bersepakat untuk membawa masalah tersebut ke Mahkamah

Internasional. Berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak membuktikan fakta-faktanya sehingga akhirnya Malaysia lah yang mampu membuktikan bahwa secara administrasi Malaysia sudah menduduki pulau tersebut.

B. Potensi Konflik pulau pulau terluar di wilayah Indonesia

1. Latar belakang konflik Pulau terluar.

Indonesia dan Malaysia memiliki masalah perbedaan pemahaman rezim laut dengan Malaysia di bagian utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Pulau Berhala yang terletak di Kecamatan Tanjungbintang, kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara merupakan pulau terluar yang berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia. Memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi namun rawan *illegal fishing* dan *effective occupation* dari negara tetangga. Di samping itu pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, masalah batas wilayah perairan di sebelah timur Pulau Sebatik dan di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan juga akan menjadi “ pekerjaan rumah “ yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia

C. Upaya Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Pulau terluar

Dari aspek yuridis penanganan pulau-pulau kecil terluar masih memerlukan perangkat perundangan-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan serta memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres dll yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan negara baik di darat maupun batas laut kiranya menjadi hal yang sangat mendesak.

VII. Kesimpulan

Sejauh ini upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pulau pulau terluar di Indonesia adalah sejak tahun 2005 pemerintah telah melakukan kegiatan toponim yaitu upaya penamaan pulau-pulau kecil. Hal itu merupakan amanat dari Perpres No. 112 tahun 2006 tentang tim nasional pembakuan rupa bumi. Saat ini ada 13.466 pulau yang telah dilakukan dan dinamakan (semua pulau harus mempunyai letak geografis). Telah di depositkan pula di PBB pada tahun 2012 kemudian sisa pulau yang lainnya akan dilaporkan pada tahun 2017.

Disamping itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memfokuskan pembangunan di 12 pulau kecil terluar. Kedua belas pulau itu meliputi Nusa Kambangan, Pulau Sebatik, Miangas, Marore, Marampit, Lingayan, Maratua, Wetar, Alor, Enggano, Simuk dan pulau Dubi Kecil. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar merupakan upaya untuk mendukung percepatan dan pengembangan pembangunan ekonomi Indonesia, memberi peluang untuk ekonomi pariwisata serta membantu pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan Negara.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

- Bernard Kent Sondakh, 2000. *Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI*
- Djawahir Facrurozy 2000 (dkk), *Kajian Akademik Masalah Batas daratan Indonesia-Timor Lorosae* Jakarta Grasindo
- Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta : CSIS.
- Hasjim Djalal, MA. *Menjadikan Pulau Kecil Terluar Sebagai Pusat Pertumbuhan*, Sinar Grafika Jakarta
- Jefri Fernando Situmeang, 2009 *Upaya upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Kekayaan Alam Laut di Kepulauan Riau dan Pulau pulau Sekitarnya Dari Dampak Reklamasi Wilayah Singapura Universitas Atmajaya Yogyakarta*
- J.G. Starke 2008, *Pengantar Hukum Internasional* Jakarta : Sinar Grafika
- Kaligis O.C., & Associates, 2003. *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta : O.C Kaligis & Associates.
- Mega Pasulian, 1999 *Penerapan Penguasaan Efektif Yang Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Blok Ambalat Dikaitkan Dengan Konvensi Hukum Laut 1982* Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatmadja-Etty R. Agoes 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja 2003, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta Bandung
- Nugroho Notosusanto, 1970. *Norma-norma dalam Penelitian dan Penulisan Sejarah*, Jakarta : Dephankam.
- Sahala Hutabarat 2009, *Pengantar Ilmu Kelautan* Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia
- Stanislaus Lintang Pramudya, 2009 *Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Berkaitan Dengan Blok Ambalat Menurut Ketentuan UNCLOS 1982* Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Sugeng Istanto 1994, *Hukum Internasional* Universitas AtmaJaya Yogyakarta

Suryo Sakto Hadiwijoyo 1996, *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan*, Erlangga Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

UNCLOS 1982 (United Nations Convension of Law On the Sea)

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

Peraturan Perundang-undangan No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna

Peraturan Perundang-undangan No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah RI no 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, belum di sosialisasikan kepada masyarakat internasional, sehingga memerlukan revisi pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

Peraturan Presiden no 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Internet

<http://ugm.ac.id/id/berita/1386-rawan.konflik.12.pulau.terluar.nkri.perlu.perhatian.khusus>

<http://www.dephan.go.id/index.php>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/17/31-pulau-terluar-jadi-perhatian-pemerintah>

<http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774>

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terluar_Indonesia

<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/pemetaan-pulau-pulau-kecil-terluar>

<http://pustaka.pu.go.id/new/resensi-buku-detail.asp?id=233>

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2013. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia. Buku Ketiga* (<http://www.dkp.go.id>,

Kuswandari, E. 2006. *Peta Laut Indonesia Perlu Diperbaharui*. Sinar Harapan. (<http://www.sinarharapan.go.id>).

Sumber-sumber lain

Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013

Artikel dari surat kabar

Internatonal Herald Tribune, tanggal 28 April 2000

Kompas.com tanggal 12 Maret 2013